



*Rudy C Tarumingkeng: Penyebab Struktural Inflasi - Produksi, Iklim,
Logistik, Impor, Tata Niaga*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

7 April 2026

PENYEBAB STRUKTURAL INFLASI: PRODUKSI, IKLIM, LOGISTIK, IMPOR, TATA NIAGA

Abstrak

Makalah ini membahas penyebab struktural dinamika harga pangan dan inflasi pangan di Indonesia dengan menyoroti lima sumber utama, yaitu produksi, iklim, logistik, impor, dan tata niaga. Tesis utama makalah ini adalah bahwa gejolak harga pangan di Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya oleh faktor musiman atau lonjakan permintaan jangka pendek, melainkan oleh kombinasi kelemahan struktural yang saling terkait. Produksi domestik masih menghadapi persoalan skala usaha tani yang kecil, produktivitas yang belum merata, tekanan pada pasokan komoditas tertentu, dan ketidaksesuaian antara pola produksi dengan perubahan permintaan. Iklim menambah ketidakpastian melalui hujan ekstrem, pergeseran musim, dan datangnya musim kemarau lebih awal di banyak wilayah pada 2026. Logistik masih mahal dan tidak cukup andal; data Kemenko Perekonomian menunjukkan biaya logistik Indonesia pada 2025 masih sekitar 14,29 persen dari PDB, lebih tinggi daripada banyak negara ASEAN, dan inefisiensi distribusi disebut memicu disparitas harga antardaerah. Dalam aspek impor, Indonesia tetap bergantung pada pasokan luar negeri untuk sejumlah komoditas strategis seperti gandum, kedelai, daging sapi, buah segar, dan bahan baku pakan, sementara pengaturan impor melalui neraca komoditas dan perizinan membuat isu

pasokan domestik selalu bersinggungan dengan isu tata niaga. Studi Bank Dunia menegaskan bahwa harga beras dan pangan pokok di Indonesia lebih tinggi daripada banyak negara regional, antara lain karena tingginya biaya produksi, pengolahan, distribusi, konektivitas yang lemah, serta pembatasan perdagangan dan impor. Pada awal 2026, dinamika ini tercermin dalam inflasi pangan yang bergerak dari deflasi *volatile food* sebesar 1,96 persen (mtm) pada Januari menjadi inflasi 2,50 persen pada Februari dan 1,58 persen pada Maret, dengan sumber tekanan bergeser dari cabai dan bawang ke daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Makalah ini menyimpulkan bahwa kelima faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk satu rantai sebab-akibat yang menentukan harga pangan. Karena itu, perbaikan jangka panjang harus bergerak serentak: memperkuat produksi, membangun ketahanan iklim, menurunkan biaya logistik, merancang impor yang adaptif, dan membenahi tata niaga agar lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan riil pasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata kunci: *harga pangan, inflasi pangan, produksi pertanian, iklim, logistik, impor, tata niaga, Indonesia*

Penyebab Struktural Inflasi: Produksi, Iklim, Logistik, Impor, Tata Niaga

Pendahuluan

Harga pangan di Indonesia hampir selalu menjadi isu ekonomi yang sekaligus sosial dan politik. Ia menjadi ekonomi karena memengaruhi inflasi, daya beli, biaya hidup, dan pertumbuhan. Ia menjadi sosial karena menyentuh langsung konsumsi rumah tangga, terutama kelompok miskin dan rentan. Ia juga menjadi politik karena menyangkut legitimasi negara

dalam menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok. Dalam konteks ini, gejolak harga pangan tidak boleh dibaca semata-mata sebagai peristiwa pasar yang kebetulan. Pada banyak kasus, lonjakan harga justru memperlihatkan adanya gangguan yang lebih dalam pada struktur produksi, iklim, distribusi, kebijakan impor, dan tata niaga. Bank Indonesia sendiri menegaskan bahwa inflasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor penawaran dan kejutan pada kelompok *volatile food* serta harga yang diatur pemerintah, sehingga pengendaliannya memerlukan koordinasi yang erat antara BI dan pemerintah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Awal 2026 memberi contoh yang baik mengenai kompleksitas tersebut. Inflasi *volatile food* Indonesia bergerak sangat tajam: Januari 2026 mencatat deflasi 1,96 persen secara bulanan, tetapi Februari berbalik menjadi inflasi 2,50 persen, lalu Maret masih tinggi di 1,58 persen. Perubahan ini tidak mungkin dijelaskan hanya dengan satu sebab. Januari dipengaruhi peningkatan pasokan masa panen, terutama pada cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Februari dipengaruhi kenaikan permintaan dan gangguan cuaca. Maret menampilkan tekanan yang lebih luas pada daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras. Pola tersebut menunjukkan bahwa inflasi pangan Indonesia merupakan hasil interaksi banyak faktor struktural yang saling mengunci. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini menafsirkan tema “Penyebab struktural: produksi, iklim, logistik, impor, tata niaga” dalam konteks harga pangan dan inflasi pangan Indonesia. Fokus ini dipilih karena kelima faktor tersebut paling nyata bekerja melalui rantai pangan. Pertanyaan pokoknya ialah: mengapa harga pangan Indonesia sering bergejolak, mengapa sebagian komoditas pokok tetap mahal secara relatif, dan mengapa perbaikan jangka pendek sering tidak menyelesaikan akar persoalan. Jawaban yang diajukan di sini adalah bahwa struktur pangan Indonesia masih dibebani oleh lima lapis masalah. Produksi belum cukup responsif, iklim makin tidak pasti, logistik masih mahal dan lambat, impor berada dalam rezim yang sensitif secara

ekonomi-politik, dan tata niaga belum sepenuhnya efisien maupun transparan. ([World Bank](#))

Kerangka Konseptual

Secara konseptual, harga pangan dibentuk oleh interaksi antara pasokan, permintaan, ekspektasi, dan kelembagaan pasar. Dalam ekonomi yang sederhana, harga dapat dipandang sebagai hasil pertemuan penawaran dan permintaan. Namun pada sistem pangan nasional seperti Indonesia, pertemuan itu dimediasi oleh iklim, teknologi budidaya, biaya input, kondisi jalan dan pelabuhan, akses pembiayaan, distribusi antarpulau, regulasi perdagangan, hingga kekuatan pelaku pasar dalam rantai niaga. Karena itu, bila harga pangan naik, penyebabnya tidak otomatis “produksi turun” atau “permintaan naik”. Bisa saja harga naik karena pasokan sebenarnya cukup, tetapi distribusinya terlambat. Bisa juga harga tinggi bertahan karena hambatan impor, struktur perizinan, atau insentif tata niaga yang tidak efisien. Temuan Bank Dunia bahwa harga pangan Indonesia—terutama komoditas bergizi tinggi dan beras—relatif tinggi dibanding kawasan menunjukkan bahwa masalahnya memang bersifat sistemik, bukan insidental. ([World Bank](#))

Dalam kerangka itu, lima faktor yang dibahas di sini sebaiknya tidak dipisahkan terlalu tegas. Produksi dipengaruhi iklim. Logistik memengaruhi efektivitas produksi. Impor memengaruhi insentif produksi domestik sekaligus stabilitas pasokan. Tata niaga menentukan bagaimana hasil produksi dan barang impor didistribusikan, dengan biaya berapa, dan pada siapa manfaat harga dibagikan. Kelemahan pada satu titik bisa mengalir ke titik lain. Misalnya, curah hujan ekstrem menurunkan kualitas panen dan menghambat transportasi; transportasi yang terlambat menaikkan biaya logistik; pasokan yang tersendat mendorong wacana impor; tetapi jika tata niaga impor lambat atau restriktif, harga domestik tetap tinggi. Inilah yang membuat persoalan harga pangan di Indonesia harus dibaca sebagai ekosistem masalah, bukan sekadar daftar masalah. ([BMKG](#))

Produksi sebagai Akar Pertama

Penyebab struktural pertama adalah produksi. Dalam diskursus publik, produksi sering dipahami secara sempit sebagai soal banyak atau sedikitnya panen. Padahal, secara struktural, persoalan produksi mencakup skala usaha tani, produktivitas, akses input, kualitas benih, irigasi, pembiayaan, mekanisasi, dan kemampuan sistem produksi merespons perubahan permintaan. Bank Dunia menilai sekitar setengah petani Indonesia adalah petani kecil, dengan pendapatan rata-rata yang rendah dan kerentanan tinggi terhadap guncangan iklim. Bank Dunia juga menekankan bahwa sistem pasokan pangan Indonesia lambat merespons permintaan pasar yang semakin beragam. Artinya, problem produksi Indonesia bukan hanya kuantitas, tetapi juga fleksibilitas dan efisiensi sistem produksinya. ([World Bank](#))

Data produksi padi pada awal 2026 menunjukkan gambaran yang ambivalen. BPS melaporkan bahwa produksi padi Februari 2026 diperkirakan mencapai 5,05 juta ton GKG, naik 27,41 persen dibanding Februari 2025, dengan produksi beras sekitar 2,91 juta ton. Ini memberi kesan bahwa pasokan padi menguat. Namun pada saat yang sama, BPS juga memperkirakan potensi produksi padi Februari–April 2026 sebesar 21,24 juta ton GKG, turun 4,04 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan untuk Maret–Mei 2026 sebesar 20,68 juta ton GKG, turun 11,12 persen. Dengan kata lain, perbaikan bulanan tidak otomatis menghapus risiko pasokan triwulanan. Inilah salah satu ciri persoalan struktural: angka sesaat bisa membaik, tetapi fondasi ke depan masih rapuh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Masalah produksi juga tampak pada komoditas non-beras. Harga daging ayam ras dan telur ayam ras yang menjadi pendorong inflasi pangan awal 2026 terkait erat dengan biaya pakan, terutama jagung, dan efisiensi rantai pasok peternakan. BPS dalam IHPB Maret 2026 mencatat kenaikan harga tahunan pada beras, daging ayam ras, telur konsumsi ayam ras, dan jagung. Ini menunjukkan bahwa tekanan yang terlihat di tingkat konsumen sebagian telah terbentuk di tingkat perdagangan besar dan hulu. Dalam

sistem seperti ini, kenaikan harga ayam atau telur tidak bisa dibaca hanya sebagai hasil permintaan menjelang Lebaran, tetapi juga sebagai gejala dari tekanan biaya produksi yang lebih dalam. ([BPS Web API](#))

Masalah produksi juga bersifat spasial. Ketersediaan pangan tidak tersebar merata secara geografis. Jawa masih sangat dominan dalam konsumsi maupun distribusi, sementara wilayah timur menghadapi tantangan konektivitas yang lebih berat. Studi Bank Dunia tentang integrasi pasar pangan antardaerah menekankan bahwa kesiapan pasar domestik dan infrastruktur logistik menjadi pertanyaan utama ketika produksi harus semakin bergeser atau diperluas ke wilayah lain. Karena itu, problem produksi di Indonesia bukan hanya “berapa yang dihasilkan”, tetapi “di mana dihasilkan, bagaimana disalurkan, dan seberapa cepat merespons perubahan kebutuhan konsumsi nasional”. ([World Bank](#))

Iklim sebagai Akar Kedua

Penyebab struktural kedua adalah iklim. Awal 2026 tidak dapat dipahami tanpa melihat konteks meteorologis 2025/2026. BMKG menyatakan musim hujan 2025/2026 datang lebih awal dari normal, dengan 42,1 persen zona musim mengalami awal musim hujan yang lebih cepat dan 27,6 persen wilayah diperkirakan mengalami sifat hujan atas normal. BMKG juga menegaskan perlunya antisipasi terhadap banjir, longsor, genangan, dan gangguan hidrometeorologi, serta secara khusus menyebut penyesuaian kalender tanam, perbaikan irigasi dan drainase, dan penggunaan varietas tahan genangan sebagai langkah penting bagi sektor pertanian. Fakta ini menunjukkan bahwa iklim bukan latar pasif, tetapi variabel aktif yang membentuk produksi pangan. ([BMKG](#))

Gangguan iklim tidak hanya merusak tanaman di lahan. Ia juga mengganggu ritme tanam, memicu serangan hama dan penyakit, menaikkan kerusakan pascapanen, dan menunda distribusi hasil panen ke pasar. Pada awal 2026, BI secara eksplisit mengaitkan kenaikan inflasi pangan Februari dengan gangguan cuaca yang menurunkan pasokan. Artinya, iklim bekerja melalui dua jalur sekaligus: produksi berkurang dan

distribusi melambat. Dalam ekonomi pangan Indonesia, kedua jalur ini sangat penting, karena banyak komoditas seperti cabai, bawang, sayuran, dan produk hewani memiliki elastisitas pasokan jangka pendek yang rendah. Sedikit gangguan cuaca dapat segera berubah menjadi lonjakan harga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Yang membuat masalah iklim menjadi struktural adalah karena ketidakpastiannya semakin besar. BMKG pada Maret 2026 juga memproyeksikan musim kemarau 2026 datang lebih awal, dengan 46,5 persen zona musim diperkirakan mengalami awal kemarau yang lebih maju dari biasanya, dan puncak kemarau di banyak wilayah diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Ini berarti petani, pedagang, dan pembuat kebijakan harus berhadapan dengan dua risiko sekaligus dalam satu rentang tahun: hujan berlebih pada satu fase dan kemarau lebih dini pada fase berikutnya. Struktur produksi pangan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan ekstrem semacam ini akan terus menghasilkan volatilitas harga. ([BMKG](#))

Bank Dunia juga menekankan bahwa petani kecil Indonesia rentan terhadap guncangan iklim, dan proyek ICARE dirancang justru untuk membantu adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pendekatan *climate-smart agriculture* dan model rantai nilai yang lebih tangguh. Pesan pentingnya ialah: bila adaptasi iklim belum menjadi bagian inti dari sistem produksi pangan, maka gejolak harga akan terus berulang. Dengan kata lain, iklim memperburuk problem produksi yang sudah ada, tetapi juga menguji apakah kelembagaan pertanian Indonesia cukup tangguh untuk belajar dan beradaptasi. ([World Bank](#))

Logistik sebagai Akar Ketiga

Penyebab struktural ketiga adalah logistik. Dalam banyak perdebatan publik, logistik sering dipersempit menjadi ongkos transportasi. Padahal, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia tidak terutama didorong oleh tarif angkut semata, melainkan oleh apa yang disebut sebagai "nilai waktu": keterlambatan, waktu transit yang panjang,

bongkar-muat yang lambat, pergudangan, administrasi, dan rantai pasok yang terputus-putus. Studi yang sama menegaskan bahwa konektivitas yang buruk merusak stabilitas harga pangan di wilayah-wilayah pinggiran, terutama Indonesia timur, dan bahwa dampak logistik terhadap harga konsumen jauh lebih besar daripada sekadar markup transportasi. ([World Bank](#))

Masalah ini masih sangat relevan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa pada triwulan III 2025 biaya logistik Indonesia masih sekitar 14,29 persen terhadap PDB. Laporan yang sama menyebut angka ini tetap lebih tinggi dibanding banyak negara ASEAN yang umumnya sudah berada di bawah 10 persen dari PDB. Kemenko juga menyatakan bahwa inefisiensi distribusi menyebabkan disparitas harga antarwilayah, memicu tekanan inflasi, dan mengganggu kestabilan pasokan kebutuhan pokok. Jadi, logistik di Indonesia bukan sekadar isu daya saing ekspor, tetapi juga isu inflasi domestik dan keterjangkauan pangan. ([kinerja.ekon.go.id](#))

Masalah logistik Indonesia bersifat struktural karena ditopang oleh geografi kepulauan, ketimpangan infrastruktur, dan kelemahan regulasi operasional. Kemenko Perekonomian menyebut beberapa kendala utama pada 2025: Indonesia berbentuk kepulauan sehingga membutuhkan moda multimoda, infrastruktur logistik di luar Jawa belum merata, dan regulasi serta kebijakan yang telah diterapkan belum optimal. Laporan tersebut juga menyebut pembatasan mobilitas truk saat HBKN sebagai faktor yang sempat menaikkan biaya logistik. Dari perspektif pangan, ini berarti harga bisa naik bukan hanya karena stok kurang, tetapi karena stok yang ada tidak bergerak dengan cepat dan murah. ([kinerja.ekon.go.id](#))

Studi Bank Dunia tentang pasar pangan antardaerah bahkan menempatkan integrasi pasar sebagai isu sentral bagi Indonesia. Wilayah surplus dan wilayah defisit tidak otomatis terhubung secara efisien. Ketika keterhubungan lemah, harga di wilayah produsen bisa rendah sementara harga di wilayah konsumen tetap tinggi. Dalam situasi seperti itu, petani

tidak selalu menikmati harga baik, tetapi konsumen tetap membayar mahal. Ini salah satu paradoks utama sistem pangan Indonesia: inefisiensi logistik bisa merugikan produsen dan konsumen sekaligus. ([World Bank](#))

Impor sebagai Akar Keempat

Penyebab struktural keempat adalah impor. Dalam konteks pangan, impor di Indonesia selalu berada di persimpangan antara dua logika. Di satu sisi, impor diperlukan untuk menutup kekurangan pasokan, menstabilkan harga, dan memasok komoditas yang memang tidak memadai diproduksi di dalam negeri. Di sisi lain, impor sering dipandang sensitif karena berhubungan dengan perlindungan petani domestik, harga gabah saat panen, dan kedaulatan pangan. Ketegangan antara dua logika ini membuat kebijakan impor pangan sangat mudah berubah dan sangat menentukan dinamika harga. ([World Bank](#))

Ketergantungan terhadap impor masih nyata untuk sejumlah komoditas. U.S. Commercial Service mencatat impor pertanian Indonesia terus naik, mencapai sekitar US\$29,6 miliar pada 2024, dengan komoditas yang sering diimpor meliputi kedelai, gandum, beras, daging sapi, buah segar, dan berbagai bahan baku pakan. Ini memperlihatkan bahwa dalam struktur konsumsi dan produksi Indonesia, impor bukan elemen marginal. Untuk komoditas seperti gandum, misalnya, impor bukan sekadar penyangga, tetapi fondasi pasokan. Untuk kedelai, bahan baku pakan, atau daging sapi, impor juga menjadi instrumen penting untuk menutup celah antara permintaan dan kemampuan produksi domestik. ([Trade.gov](#))

Data perdagangan awal 2026 juga menunjukkan bahwa impor masih bergerak naik. BPS mencatat nilai impor Indonesia Januari 2026 sebesar US\$21,20 miliar, naik 18,21 persen dibanding Januari 2025. Secara kumulatif Januari–Februari 2026, impor nonmigas tercatat naik 17,49 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Memang data ini tidak berarti semua kenaikan berasal dari pangan, tetapi ia menunjukkan bahwa struktur pasokan domestik tetap terhubung erat dengan pasar global. Dalam konteks pangan, keterhubungan ini berarti harga domestik

dipengaruhi bukan hanya oleh panen lokal, tetapi juga oleh nilai tukar, biaya impor, harga komoditas dunia, dan kelancaran perizinan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Yang membuat impor menjadi penyebab struktural ialah karena desain kebijakannya sendiri memengaruhi harga. Bank Dunia telah lama menilai bahwa konsumen Indonesia membayar harga lebih tinggi untuk beras dan bahan pokok lain antara lain karena kebijakan perdagangan pertanian yang restriktif. Dalam laporan 2022, Bank Dunia menyebut persyaratan lisensi impor, pembatasan pelabuhan masuk, dan monopoli impor sebagai non-tariff measures yang menjaga harga pangan tetap tinggi, dan reformasinya berpotensi menurunkan harga pangan domestik secara signifikan. Bank Dunia juga menekankan bahwa harga tinggi tidak selalu menguntungkan petani, sebab sekitar dua pertiga petani Indonesia adalah pembeli bersih pangan. Ini menjadikan debat impor Indonesia sangat penting: kebijakan yang dimaksudkan melindungi produsen bisa pada saat yang sama membebani konsumen dan bahkan banyak petani sendiri. ([World Bank](#))

Tata Niaga sebagai Akar Kelima

Penyebab struktural kelima adalah tata niaga. Tata niaga di sini tidak sekadar berarti perdagangan, melainkan keseluruhan aturan dan praktik yang menentukan bagaimana komoditas bergerak dari produksi ke konsumsi: siapa yang boleh mengimpor, kapan impor disetujui, melalui pelabuhan mana barang masuk, bagaimana stok diserap, siapa menguasai distribusi, bagaimana data kebutuhan dihitung, dan bagaimana keputusan diambil. Dalam struktur pangan Indonesia, tata niaga sangat menentukan apakah kekurangan pasokan cepat diatasi atau justru diperburuk oleh proses administrasi dan koordinasi yang lambat. ([BPK Regulations](#))

Indonesia kini mengaitkan sebagian tata niaga impor-ekspor dengan skema Neraca Komoditas. Perpres No. 61 Tahun 2024, sebagaimana diringkaskan dalam basis peraturan BPK, menyebut Neraca Komoditas berfungsi sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan impor serta sebagai acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi komoditas

tertentu. Perpres No. 32 Tahun 2022, yang kemudian dicabut dan diperbarui, juga menegaskan bahwa Neraca Komoditas adalah data dan informasi mengenai situasi konsumsi dan produksi untuk kebutuhan penduduk dan industri, serta mengatur penyusunan, penetapan, perubahan, dan pelaksanaan neraca komoditas. Secara normatif, ini adalah langkah untuk membuat tata niaga lebih berbasis data. Namun dalam praktik, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data, kecepatan pembaruan, dan kemampuan pemerintah menafsirkan kebutuhan riil pasar. ([BPK Regulations](#))

Masalah tata niaga menjadi struktural ketika aturan yang dibuat untuk mengatur pasokan berubah menjadi sumber friksi baru. Bank Dunia menyebut bahwa non-tariff measures seperti lisensi impor, pembatasan pelabuhan masuk, dan monopoli impor berkontribusi pada tingginya harga pangan di Indonesia. Artinya, tata niaga yang terlalu restriktif atau tidak lincah dapat membuat impor terlambat masuk ketika dibutuhkan, sehingga harga domestik tetap tinggi meskipun secara global pasokan cukup. Dalam konteks beras dan komoditas pangan pokok, keterlambatan keputusan tata niaga dapat menambah volatilitas dan mempersempit ruang stabilisasi harga. ([World Bank](#))

Tata niaga juga berkaitan dengan panjangnya rantai distribusi domestik. Ketika rantai terlalu panjang dan informasi pasar tidak simetris, harga di tingkat konsumen dapat jauh lebih tinggi daripada harga di tingkat produsen. Dalam kondisi seperti itu, disparitas harga tidak selalu berarti kelangkaan, tetapi bisa berarti margin distribusi yang membesar, koordinasi yang buruk, dan lemahnya efisiensi antar pelaku. Kemenko Perekonomian, BI, dan berbagai program seperti GNPIP/GPIPS terus menekankan pentingnya kerja sama antardaerah, digitalisasi, dan perbaikan logistik justru karena tata niaga yang terlalu panjang dan terfragmentasi membuat stabilitas harga sulit dicapai hanya dengan menambah pasokan. ([kinerja.ekon.go.id](#))

Interaksi Antarfaktor: Mengapa Masalahnya Sulit Selesai?

Salah satu alasan mengapa harga pangan Indonesia sulit benar-benar stabil adalah karena kelima faktor ini tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Produksi yang membaik bisa gagal menurunkan harga bila distribusinya lambat. Impor yang dibuka bisa kurang efektif bila tata niaganya berbelit atau pelabuhan masuk terbatas. Tata niaga yang diperbaiki masih dapat terganggu bila iklim merusak produksi dan logistik secara bersamaan. Di awal 2026, dinamika ini tampak jelas. Februari 2026 memperlihatkan bagaimana kenaikan permintaan musiman yang bertemu cuaca buruk dan pasokan menurun dapat cepat mendorong inflasi pangan. Maret 2026 memperlihatkan bahwa meskipun inflasi umum turun, tekanan pada beras dan protein hewani tetap bertahan karena persoalannya sudah bergeser ke sisi yang lebih struktural. ([BPS Web API](#))

Interaksi ini juga menjelaskan mengapa solusi parsial sering tidak cukup. Misalnya, operasi pasar dapat membantu secara jangka pendek, tetapi bila biaya logistik tetap tinggi dan produksi rentan iklim, maka harga dapat naik lagi setelah intervensi berakhir. Impor dapat meredakan tekanan pasokan, tetapi bila dilakukan terlalu lambat atau dalam tata niaga yang tidak fleksibel, stabilisasi datang terlambat. Sebaliknya, proteksi berlebihan terhadap produksi domestik tanpa peningkatan produktivitas justru dapat mempertahankan harga tinggi secara permanen. Karena itu, persoalan harga pangan Indonesia pada dasarnya adalah persoalan koordinasi antar-sistem: sistem pertanian, sistem iklim, sistem logistik, sistem perdagangan, dan sistem birokrasi ekonomi. ([World Bank](#))

Implikasi terhadap Inflasi dan Kesejahteraan

Dampak langsung dari kelima penyebab struktural ini terlihat pada inflasi pangan. Pada Januari 2026, *volatile food* mencatat deflasi bulanan 1,96 persen karena panen hortikultura. Namun pada Februari 2026, inflasi *volatile food* melonjak menjadi 2,50 persen (mtm) dan 4,64 persen (yoy), didorong daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Pada Maret 2026, kelompok ini masih mencatat inflasi 1,58 persen (mtm) dan 4,24 persen (yoy), dengan tekanan utama pada daging ayam ras, beras, dan telur ayam

ras. Pergeseran komoditas ini memperlihatkan bahwa inflasi pangan Indonesia sangat mudah dipindahkan dari satu titik lemah ke titik lemah lain dalam sistem. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bagi rumah tangga, implikasinya sangat besar. Ketika komoditas yang naik adalah beras, ayam, telur, cabai, dan minyak goreng, tekanan tidak hanya muncul pada kelompok miskin, tetapi juga pada kelas menengah. BPS pada Maret 2026 masih mencatat inflasi tahunan nasional 3,48 persen, namun variasi daerah sangat besar—Aceh 5,31 persen dan Lampung 1,16 persen. Variasi ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan rumah tangga dalam menghadapi harga pangan tidak seragam. Rumah tangga di wilayah dengan logistik lebih lemah atau pasokan lebih rapuh menanggung beban yang lebih berat. Harga pangan yang tinggi dan volatil karena itu bukan sekadar masalah makro, melainkan sumber ketimpangan regional dalam biaya hidup. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Arah Kebijakan

Bila diagnosisnya bersifat struktural, maka terapinya pun harus struktural. Pada sisi produksi, prioritasnya bukan sekadar menaikkan output tahunan, tetapi memperkuat produktivitas, adaptasi iklim, diversifikasi produksi, dan keterhubungan antara petani kecil dengan rantai nilai yang lebih modern. Bank Dunia secara eksplisit mendorong pergeseran dari produksi yang terlalu berorientasi pasokan menuju sistem yang lebih responsif terhadap permintaan pasar dan kebutuhan petani. Pendekatan ini penting agar kenaikan pendapatan masyarakat tidak selalu direspons dengan kenaikan harga karena penawaran domestik lambat menyesuaikan. ([World Bank](#))

Pada sisi iklim, informasi BMKG harus menjadi instrumen ekonomi, bukan hanya informasi cuaca. Prediksi hujan lebih awal, hujan atas normal, dan kemarau lebih cepat perlu diterjemahkan menjadi kalender tanam adaptif, pemilihan varietas, perlindungan usaha tani, manajemen air, dan mitigasi pascapanen. Jika informasi iklim hanya berhenti di meja birokrasi, maka volatilitas harga akan terus berulang. Pada sisi ini, sinkronisasi BMKG,

Kementan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan menjadi sangat penting. ([BMKG](#))

Pada sisi logistik, fokusnya tidak cukup hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga keandalan dan waktu. Temuan Bank Dunia bahwa "nilai waktu" dan reliabilitas lebih penting daripada biaya angkut murni memberi pelajaran bahwa perbaikan pelabuhan, hinterland, pergudangan, bongkar muat, dan jadwal layanan sama pentingnya dengan jalan dan kapal. Kemenko Perekonomian juga sudah mengakui bahwa target penurunan biaya logistik masih terbentur geografi kepulauan, infrastruktur di luar Jawa, dan regulasi yang belum optimal. Maka, penguatan National Logistics Ecosystem, integrasi multimoda, dan reformasi operasional pelabuhan tetap menjadi agenda sentral bila harga pangan ingin lebih stabil. ([World Bank](#))

Pada sisi impor dan tata niaga, kebijakan harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilisasi harga, perlindungan produsen, dan efisiensi pasar. Neraca Komoditas dapat menjadi alat yang berguna bila benar-benar berbasis data konsumsi dan produksi yang mutakhir serta tidak terlalu lambat merespons perubahan pasar. Tetapi bila tata niaga menjadi terlalu restriktif, Bank Dunia menunjukkan hasilnya bisa kontraproduktif: harga domestik tetap tinggi, keterjangkauan memburuk, dan bahkan petani kecil yang merupakan pembeli bersih pangan ikut dirugikan. Karena itu, impor seharusnya diposisikan sebagai instrumen stabilisasi yang adaptif dan prediktif, bukan sekadar kebijakan darurat setelah harga telanjur naik. ([BPK Regulations](#))

Penutup

Makalah ini menegaskan bahwa penyebab struktural harga pangan dan inflasi pangan di Indonesia dapat diringkas dalam lima kata kunci: produksi, iklim, logistik, impor, dan tata niaga. Kelimanya tidak berdiri sendiri. Produksi domestik masih dibatasi skala usaha kecil, produktivitas yang tidak merata, dan respons pasokan yang lambat. Iklim memperbesar ketidakpastian lewat hujan ekstrem dan pergeseran musim. Logistik

menambah biaya dan keterlambatan, terutama di negara kepulauan dengan infrastruktur yang belum merata. Impor menjadi penyangga yang diperlukan tetapi selalu sensitif secara politik dan administratif. Tata niaga menentukan apakah semua instrumen itu bekerja secara lincah atau justru menambah friksi pasar. ([World Bank](#))

Awal 2026 memperlihatkan bagaimana seluruh faktor itu bekerja sekaligus. Januari memberi ruang tenang karena panen hortikultura. Februari menunjukkan betapa cepat harga dapat berbalik ketika permintaan naik dan cuaca mengganggu pasokan. Maret membuktikan bahwa meskipun inflasi umum bisa kembali masuk sasaran, persoalan pangan belum selesai karena tekanan berpindah ke komoditas yang lebih struktural seperti beras, ayam, dan telur. Pelajarannya jelas: stabilitas harga pangan tidak bisa dibangun hanya dengan menunggu panen atau menggelar operasi pasar. Ia harus dibangun dengan membenahi fondasi sistem pangannya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam arti itu, harga pangan yang stabil sesungguhnya adalah produk dari negara yang mampu menghubungkan data iklim dengan kalender tanam, produksi dengan distribusi, impor dengan kebutuhan riil, dan tata niaga dengan kepentingan konsumen sekaligus produsen. Selama lima titik struktural ini belum dibenahi bersama-sama, Indonesia akan terus berulang kali menghadapi pola yang sama: harga yang sesaat turun, lalu naik lagi karena rantai masalah yang belum diputus. Itulah sebabnya reformasi pangan Indonesia harus dibaca bukan sebagai proyek sektoral, melainkan sebagai proyek ekonomi nasional. ([World Bank](#))

Glosarium

Volatile food: kelompok harga pangan bergejolak yang sangat dipengaruhi musim, cuaca, produksi, dan distribusi. BI mencatat kelompok ini mengalami deflasi 1,96 persen (mtm) pada Januari 2026, lalu inflasi 2,50 persen pada Februari dan 1,58 persen pada Maret. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Neraca Komoditas: data dan informasi mengenai situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan industri, yang menjadi dasar penerbitan persetujuan impor dan ekspor pada komoditas tertentu. ([BPK Regulations](#))

Biaya logistik: keseluruhan biaya yang timbul untuk memindahkan barang, termasuk transportasi, pergudangan, administrasi, dan biaya karena keterlambatan. Kemenko Perekonomian mencatat biaya logistik Indonesia sekitar 14,29 persen dari PDB pada 2025. ([kinerja.ekon.go.id](#))

Nilai waktu dalam logistik: biaya ekonomi akibat waktu tempuh, keterlambatan, bongkar muat, dan ketidakandalan rantai pasok. Studi Bank Dunia menilai inilah salah satu sumber utama mahalnya logistik Indonesia. ([World Bank](#))

Ketahanan pangan: kemampuan sistem pangan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi penduduk. Dalam konteks makalah ini, ketahanan pangan menuntut pembenahan simultan pada produksi, iklim, logistik, impor, dan tata niaga. ([World Bank](#))

Non-tariff measures (NTMs): kebijakan non-tarif seperti lisensi impor, pembatasan pelabuhan masuk, atau monopoli tertentu yang dapat memengaruhi harga domestik. Bank Dunia menilai NTMs tertentu berkontribusi pada tingginya harga pangan di Indonesia. ([World Bank](#))

Referensi (APA 7)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2025, September 13). *Musim hujan datang lebih cepat, ada ancaman bahaya hidrometeorologi sekaligus peluang untuk pertanian.* ([BMKG](#))

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026, Maret 4). *BMKG: Musim kemarau 2026 datang lebih awal, puncak terjadi Agustus mendatang.* ([BMKG](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, Februari 2). *Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG).* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, Maret 2). *Ekspor dan impor Indonesia Januari 2026 masing-masing tercatat US\$22,16 miliar dan US\$21,20 miliar.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, Maret 3). *Surplus neraca perdagangan di awal tahun 2026.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, April 1). *Luas panen padi pada Februari 2026 sebesar 0,94 juta hektare dengan produksi padi diperkirakan sebanyak 5,05 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, April 1). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, April 1). *Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum nasional Maret 2026 naik 2,28 persen (y-on-y).* ([BPS Web API](#))

Bank Indonesia. (2026, Februari 2). *IHK Januari 2026 mengalami deflasi.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, Februari 12). *Fokuskan ketahanan pangan, GPIPS jadi strategi baru jaga inflasi.* (tpin.ekon.go.id)

Bank Indonesia. (2026, Maret 12). *Analisis inflasi Februari 2026*. ([BPS Web API](#))

Bank Indonesia. (2026, April 1). *Inflasi IHK Maret 2026 tetap terjaga*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Laporan capaian kinerja sementara triwulan III tahun 2025*. ([kinerja.ekon.go.id](#))

Peraturan BPK RI. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas*. ([BPK Regulations](#))

Peraturan BPK RI. (2024). *Perpres No. 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas*. ([BPK Regulations](#))

U.S. Commercial Service. (2025, November 17). *Indonesia – Agriculture*. ([Trade.gov](#))

World Bank. (2015). *Improving Indonesia's freight logistics system: A plan of action*. ([World Bank](#))

World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: December 2022*. ([World Bank](#))

World Bank. (2022, September 9). *The World Bank supports Indonesia's agriculture sector to become more resilient and inclusive*. ([World Bank](#))

World Bank. (2022). *Indonesia Agriculture Value Chain Development Project (ICARE)*. ([World Bank](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 7 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d4b1d7-91a0-839b-8cb9-b5d86c596a23>